

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN *STUNTING* (STUDI PERAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) DI KECAMATAN UNTER IWES)

Emy Faridah¹, Ahmad Yamin^{2*}, dan Geatriana Dewi³

¹Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

Corresponding author: ahmad.yamin@uts.ac.id

ABSTRAK

Stunting dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain keadaan sosial dan ekonomi orang tua, asupan nutrisi selama kehamilan, riwayat kesehatan bayi, gizi buruk atau malnutrisi yang dialami bayi, serta pola asuh orang tua yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Kecamatan Unter Iwes merupakan salah satu Kecamatan yang angka stunting tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Collaborative Governance* dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007). Teori ini menitikberatkan pada proses kolaboratif yang dilakukan oleh TPK sebagai perantara dan kolaborator pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian imunisasi dan pemberian vitamin, pemantauan gizi dan berat badan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen dari masyarakat khususnya pada TPK bersama dengan elemen masyarakat melakukan pencegahan stunting. Selain itu untuk pelaksanaan *collaborative governance* dalam program penanggulangan stunting di Kecamatan Unter Iwes sudah terlaksana secara konvergensi, dimana konvergensi dalam program penanggulangan stunting antara *stakeholder* terkait sudah dilakukan secara terorganisir. Kedua, peran TPK dalam proses kolaborasi program penanganan stunting di Kecamatan Unter Iwes terdapat dua peran TPK yaitu sebagai fasilitator dan penyuluh dalam program, dan sebagai pendampingan penanganan stunting melibatkan pemerintah, swasta dari PT. AMNT, puskesmas, Dinas Kesehatan dan Dinas terkait yang terjalin secara kovertansi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk mendukung penurunan stunting di Kecamatan Unter Iwes dilakukan *Collaborative Governance* yang meliputi kegiatan-kegiatan yang melibatkan organisasi perangkat daerah dan melibatkan sektor swasta, masyarakat, akademisi dan organisasi kemasyarakatan. Dan peran Tim Pendamping keluarga yang mempunyai dua peran yaitu sebagai fasilitator dan instruktur dalam penanganan stunting.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*; *Stunting*; TPK.

ABSTRACT

Stunting is known in children suffering from chronic nutritional problems. This condition is influenced by many factors, including the social and economic conditions of parents, nutritional intake during pregnancy, the baby's medical history, poor nutrition or malnutrition experienced by the baby, and parenting styles that are not in accordance with the child's growth and development, especially in the period of 1,000 HPK. Unter Iwes sub-district is one of the sub-districts with a high stunting rate caused by several factors. Therefore, support is needed to overcome the problem of stunting and empower women. The purpose of this study is to reveal the implementation of collaborative governance in stunting handling programs and explain the role of TPK in reducing stunting rates. To examine these problems, the theory used in this study is Collaborative Governance proposed by Ansell and Gash (2007). This theory focuses on the collaborative process carried out by TPK as an intermediary and collaborator of the government. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The results of this study

show that first, the implementation of several activities, namely the Supplementary Feeding (PMT) program, immunization and vitamin administration, nutrition and weight monitoring is expected to increase awareness and commitment from the community, especially in TPK together with community elements to prevent stunting. In addition, the implementation of collaborative governance in the stunting reduction program in Unter Iwes District has been carried out in a convergence manner, where convergence in the stunting reduction program between relevant stakeholders has been carried out in an organized manner. By involving several stakeholders ranging from the private sector, the community, academics, to community organizations. Second, the role of TPK in the collaborative process of stunting management programs in Unter Iwes District has two roles, namely as facilitators and extension workers in the program, and as assistance in stunting management involving the government, private sector from PT. AMNT, puskesmas, Dinas Kesehatan and related agencies are intertwined in a convergent manner. Where interventions are carried out in a coordinated, integrated, and joint manner targeting priority target groups living in Unter Iwes District to prevent stunting.

Keywords: Collaborative Governance; Stunting; TPK.

1. PENDAHULUAN

Target persentase *stunting* di Indonesia pada tahun 2024 dapat turun hingga 14 persen . Presiden Republik Indonesia juga yakin bahwa dengan kekuatan bersama maka angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai, asal semuanya bekerja bersama-sama. Angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai, jika ada kerjasama dan bekerja bersama-sama. Secara rinci, data *stunting* per wilayah provinsi di Indonesia pada tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 1. Data Prevalensi Stunting

NO	PROVINSI	PREVALENSI (persen)
1	Aceh	31,2
2	Sumatera Utara	21,1
3	Sumatera Barat	25,2
4	Riau	17
5	Jambi	18
6	Sumatera Selatan	18,6
7	Bengkulu	19,8
8	Lampung	15,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	18,5
10	Kepulauan Riau	15,4
11	DKI Jakarta	14,8
12	Jawa Barat	20,2
13	Jawa Tengah	20,8
14	DI Yogyakarta	16,4
15	Jawa Timur	19,2
16	Banten	20
17	Bali	8
18	Nusa Tenggara Barat	32,7
19	Nusa Tenggara Timur	35,3
20	Kalimantan Barat	27,8
21	Kalimantan Tengah	26,9
22	Kalimantan Selatan	24,6
23	Kalimantan Timur	23,9
24	Kalimantan Utara	22,1

Dari data di atas dapat dilihat Provinsi NTB berhasil menurunkan angka stunting hingga 8,1 persen. Penurunan yang cukup drastis tersebut menjadikan NTB sebagai Provinsi dengan progres tertinggi di Indonesia. Capaian membanggakan tersebut berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan RI bersama BKPK (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan) tahun 2023. Hasil survey tersebut menunjukkan angka stunting NTB sebesar 24,6 persen, menurun 8,1 persen dibanding data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. NTB menempati urutan ke-16 dari 38 provinsi dengan progres penurunan tertinggi se-Indonesia.

Atas keberhasilan itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberi andil dalam mendukung penurunan angka stunting dengan penilaian kinerja kabupaten/kota dengan meraih nilai 107,24 dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dengan nilai tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa menempati peringkat pertama dalam melaksanakan konvergensi penurunan stunting di Provinsi NTB pada tahun 2023. Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa mencatat bahwa angka kasus *stunting* di wilayah Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.367 anak tercatat mengalami *stunting* akibat kekurangan gizi. Pada tahun 2019 mencapai 2,57%. Pada awal tahun 2020, dengan merebaknya pandemi penyakit virus corona (Covid-19), angka stunting meningkat sebesar 0,56 poin persentase menjadi 3,13 persen. Pada tahun 2021, jumlah kasus stunting mengalami penurunan, namun penurunannya hanya 0,03% hingga 3,10%. Dari 44.058 bayi di Kabupaten Sumbawa, tercatat 1.367 anak, dimana 3,1 persen diantaranya mengalami stunting. (Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, 2023).

Sejauh ini, minat pemerintah dalam mengatasi masalah stunting sudah cukup, terbukti dengan adanya berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan tersebut antara lain UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Peningkatan Gizi, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Gizi, dan inisiatif pertumbuhan lainnya metode penghambatan, pengelolaan. Lebih lanjut, permasalahan stunting merupakan bagian dari program prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Pedoman di atas merupakan pedoman bagi masyarakat untuk mengatasi masalah stunting lokal. Tentang penetapan lokasi desa untuk mempercepat penurunan stunting melalui nutrisi sensitif dan intervensi gizi spesifik di wilayah Sumbawa, termasuk Negara Bagian Sumbawa yang memiliki peraturan khusus untuk mengatasi stunting. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 406 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Lokasi Percepatan Penurunan Stunting melalui Intervensi Gizi Sensitif dan Gizi Spesifik di kabupaten Sumbawa Tahun 2023.

Secara keseluruhan angka stunting di Kabupaten Sumbawa mencapai 8,11 persen dari total jumlah anak. Hingga September 2023, terdapat 859 kasus stunting di Kabupaten Sumbawa berdasarkan catatan Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumbawa. Jumlah tersebut tersebar di delapan desa, namun tertinggi berada di Desa Pelat, Kerekeh, dan Pungka. Dari data di atas terlihat bahwa angka stunting di wilayah Desa Pelat masih cukup tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan yang berbeda harus dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, terlihat jelas bahwa proses kolaboratif untuk mengatasi stunting telah dimulai di Desa Pelat.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan non-pemerintah seperti masyarakat lokal dan pihak swasta. Keterlibatan pihak swasta dalam penanganan stunting di wilayah Desa Pelat salah satunya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. AMNT. Bentuk partisipasinya antara lain dengan memberikan tambahan nutrisi kepada ibu hamil dan bayi, serta menyediakan fasilitas posyandu seperti alat pengukur bayi dan timbangan bayi. Di sisi lain, komitmen masyarakat sendiri terlihat melalui partisipasinya dalam kegiatan Posyandu meskipun masyarakat tidak sepenuhnya aktif.

Selain kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga melakukan upaya lebih keras agar target tersebut dapat dicapai dan salah satu bentuk intervensi kebijakan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah mengimplementasikan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2022

tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

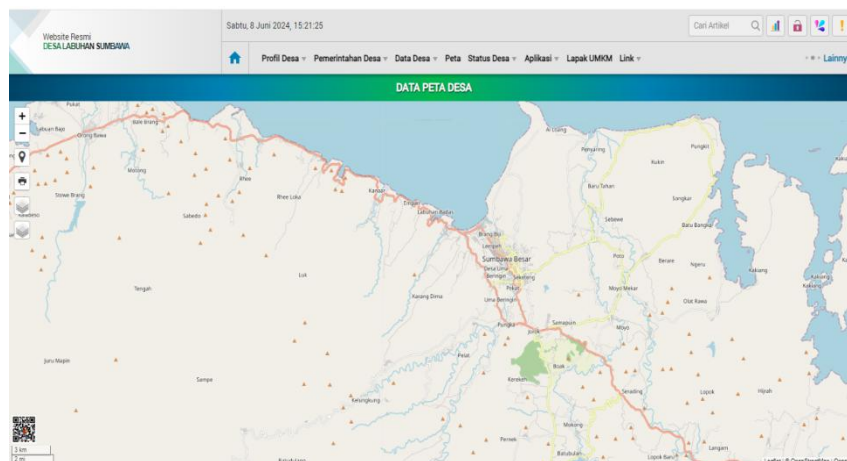
Keterlibatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kecamatan Unter Iwes dalam pelaksanaan *collaborative governance* pada penanggulangan *stunting* sangat dibutuhkan mengingat bahwa Tim Pendamping Keluarga merupakan mitra dari pemerintah. TPK Sebagai mitra pemerintah, TPK sudah seharusnya terlibat dalam penanganan kasus stunting. TPK bekerja sama dengan berbagai sektor dan masyarakat terkait untuk mengatasi dan mencegah kasus *stunting*. Konsep pengelolannya pun dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga, TPK memiliki peran penting untuk meningkatkan Keberhasilan pembangunan pemerintah sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan.

Peran dari TPK di Kecamatan Unter Iwes tak lepas dari upaya dalam penanganan *stunting* khususnya yang dilakukan oleh TPK dapat dilihat dalam prosedur yang rumit. Keluarga dan masyarakat umum juga dijadikan subjek dan subyek dalam melaksanakan intervensi gizi sensitif. dan pelaksanaan intervensi disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat setempat. Program dan kegiatan tersebut dapat berupa peningkatan kesadaran terhadap isu *stunting*. berupa edukasi yakni sosialisasi terkait dengan *stunting* atau pun kegiatan yang langsung terhadap anak yang terkena *stunting* seperti pemberian makanan tambahan (PMT) yang juga melibatkan pemerintah maupun Tim Pendamping Keluarga dalam pelaksanaannya.

2. METODOLOGI

a. Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Penelitian yang dilaksanakan selama 3(tiga) bulan, mulai dari Bulan Maret hingga bulan Mei 2024.



Gambar 1. Peta Kabupaten Sumbawa

b. Jenis Penelitian

penelitian ini digunakan metode kualitatif untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan *collaborative governance* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

c. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang faktual dan akurat yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan metode berikut dalam mengumpulkan data penelitian.

1) Observasi.

Untuk mencapai hasil observasi terbaik, penulis menggunakan metode partisipatif, yaitu mengamati perilaku para eksekutif dan karyawan pada kesempatan tertentu. Perhatikan

juga tata kelola kolaboratif yang dilakukan TPK dalam mendukung program penanganan stunting dengan data yang relevan. Selain itu juga dilakukan observasi mengenai bagaimana penerapan Collaborative Governance dalam mendukung program stunting di Kabupaten Sumbawa, khususnya di wilayah Unter Iwes Desa Pelat.

2) Wawancara.

Melalui wawancara, kami memperoleh informasi langsung dari responden berikut: informan kunci yaitu tim pendukung keluarga (TPK) yang terlibat dalam program stunting di Desa Pelat. TPK tersebut antara lain Camat Unter Iwes (1 orang), Kepala Desa Pelat (1 orang), Ketua TPK (1 orang), Sekretaris TPK (1 orang), Anggota TPK (1 orang), dan masyarakat sekitar. (6 orang), Ketua RW (1 orang), Bidan Puskesmas Kecamatan Unter Iwes (1 orang). Meskipun informan lain berasal dari kecamatan sebagai lokasi penelitian, fokus penelitiannya adalah pada tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh TPK dalam mendukung program penanganan stunting.

3) Dokumentasi.

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan informasi yang berupa buku, catatan, laporan, teks, gambar visual, dan merupakan suatu metode pengumpulan dokumen berupa informasi yang dapat menunjang penelitian. dokumen berupa kegiatan atau dokumen terkait tata kelola kolaboratif yang dilakukan TPK dalam mendukung program penanganan stunting diperoleh peneliti untuk mendapatkan data untuk melakukan penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah tahap pengumpulan, pengklasifikasian, dan rangkuman topik penelitian sebagai informasi penting, serta pencarian tema dan pola yang tersusun secara sistematis (Sugiono, 2009)). Reduksi data memberikan gambaran observasi sehingga memudahkan peneliti mengambil data yang ditangkap bila diperlukan.

2) Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Pada tahap ini disusun menjadi teks eksplanasi pendek berupa rangkaian informasi yang mempunyai makna sesuai dengan pertanyaan penelitian. Penyajian data membantu peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan..

3) Menarik atau Memverifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan awal yang sesuai dengan struktur narasi yang dibangun berdasarkan sumber dan penafsiran peneliti terhadap permasalahan yang diteliti bersifat sementara dan tanpa adanya bukti kuat dapat berubah. Kesimpulan data dapat berupa uraian atau gambaran tentang apa yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa merupakan satu dari 8 desa yang berada di kecamatan Unter Iwes. Desa ini memiliki kodepos 84316. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Sumbawa. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian petani. Hasil pertanian utama di desa ini ialah kopi, kemiri, kakao, kelapa, dan lain-lain. Pelat merupakan sebuah nama Desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Pelat memiliki jumlah 1.380 Kepala Keluarga.

1) Pelaksanaan *collaborative governance* dalam program penanganan *stunting* di Kecamatan Unter Iwes

Dalam penelitian ini, penulis membagikan hasil temuan atas praktek *collaborative governance* dalam program penanganan *stunting* di Desa Pelat dengan fokus padaperan TPK di Desa Pelat. Berdasarkan temuan data, penulis dapat mendeskripsikan bahwa upaya untuk konvergensi program telah dilakukan secara terorganisir dengan pemangku kepentingan terkait. Konvergensi adalah kegiatan bersama yang dilakukan secara terpadu dan saling terkait antar program baik yang bersifat fisik untuk mengembangkan infrastruktur kesehatan maupun memperkuat program pemberdayaan kesehatan dan edukasi masyarakat.

“Untuk kolaborasi kita lakukan dalam penanganan *stunting* kita sudah bergerak bersama atasi *stunting* mulai dari pemerintah, swasta, akademisi kemudian masyarakat itu sendiri termasuk dorongan dari media semua sudah kita lakukan hal-hal yang perlu kita lakukan”. (wawancara, Hajriati, 9 Mei 2024).

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah daerah untuk mengajak semua elemen untuk melakukan kolaborasi dalam percepatan penanggulangan *stunting* mulai dari masyarakat, swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat ikut terlibat dalam memperkuat sumberdaya dan penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat.

“Isu *stunting* memang melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari BPD, LPMD, RT-RW, PKK, kita semua terlibat. Termasuk pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat secara otomatis memiliki tanggung jawab, dan juga pengawasan masyarakat, karena masyarakat juga ikut aktif dalam pengawasannya.” (wawancara Syamsuddin, Mei 2024).

Prinsip keterlibatan dalam penanggulangan *stunting* dalam Desa Pelat secara umum sudah baik, melibatkan banyak stakeholder dalam kerjasama, hanya saja tidak terlalu berorientasi pada pelibatan pihak swasta dalam penanggulangan *stunting*. Dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam program penanggulangan *stunting* yang dilakukan oleh TPK Desa Pelat terdapat tiga stakeholder yang terlibat yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka *collaborative governance* yang dilakukan oleh Desa Pelat bersama stakeholder lain sesuai dengan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Desain Institusional

Pemimpin mendorong pemangku kepentingan untuk bernegosiasi dengan itikad baik dan mencari kepentingan, kompromi, dan pencapaian bersama. Tata kelola kolaboratif yang bertujuan untuk konsensus, meskipun menunjukkan bahwa konsensus tidak selalu tercapai.

2. Dalam kaitannya dengan penanganan *stunting* di Desa Pelat, Kepala Desa dapat disebut sebagai pemimpin yang fasilitatif, mengingat posisinya yang dapat menjalin komunikasi atau penghubung antara pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat. Penanganan *stunting* perlu didorong dan didukung dengan terus melakukan pendampingan kepada kegiatan yang berkaitan dengan penanganan *stunting* antar pemerintah, swasta, akademisi, media maupun PKK dan masyarakat Desa Pelat. Serta kepala Desa Pelat juga memfasilitasi pertemuan atau diskusi antar stakeholder yang terlibat. Komitmen pihak-pihak yang terlibat berubah tergantung pada keberhasilan kecil, derajat keselarasan antara program kerja sama dengan program internal, dan keyakinan dalam mencapai tujuan.

“Bentuk yang jelas kalau dari akademisi biasanya bentuknya edukasi kemudian dari swasta sendiri sifatnya membantu atau memberi bantuan-bantuan yang memang sementara ini masih bersifat langsung jadi pemberian selesai. Cuma harapannya kedepan dari swasta akan ada pendampingan mulai dari minggu depan akan ada pendampingan pendampingan yang akan dilakukan oleh swasta untuk mengentaskan masalah *stunting* masalah kita. Kemudian dari masyarakat harapannya dengan adanya edukasi dan bantuan tersebut mereka kemudian akan lebih berdaya dan paham

terhadap apa yang akan dilakukan . kemudian dari media akan memeberikan bantuan terkait dengan penyebaran informasi terkait dengan edukasinya. Kemudian terkait dengan hal-hal apa yang sudah dialakuakan di wilayah kita. Kalau pemerintah jelas tugasnya adalah mengkoordinir dan memang memastikan halterseut berjalan dengan baik. (wawancara, Hajriati Mei 2024)

Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh pihak Desa Pelat menampilkan keterlibatan sektor pemerintah dan masyarakat dan sangat sukses. Artinya pelaksanaan penindakan yang dilakukan Desa Pelat secara optimal melibatkan peran pemangku kepentingan dan hanya dilakukan melalui komunikasi melalui grup WhatsApp.

3. Proses Kolaboratif

Penelitian ini menggunakan model kolaborasi (Ansell & Gash, 2007) dengan lima variabel yang dijelaskan sebagai:

a) Dialog Tatap Muka (*face to dialog*)

Bentuk komunikasi yang terjadi dalam suatu proses kolaborasi oleh PKK di Desa Pelat biasanya melalui kesepakatan bersama. Dalam permasalahan penanggulangan *stunting* ini tentunya melibatkan semua pemangkukepentingan termasuk pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. PKK terdapat pertemuan rutin yang laksanakan yang melibatkan berbagai sektor.

“Ada, setiap bulannya diadakan rapat lintas Sektor yang dihadiri oleh Kepala Puskesmas, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa, Ketua FKK Desa, dan Kader Pendamping *Stunting*” (wawancara, Hajriati Mei 2024).

Seperti yang ada pada gambar di atas dan pernyataan dari Kader KB anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Pelat yaitu ibu Hajriati bahwa bentuk dari dialog tatap muka yang dilakukan oleh PKK di Desa Pelat dalam menangani masalah atau isu-isu terkait penanganan *stunting* yang berkolaborasi dengan Kepala Puskesmas dan berbagai sektor lain seperti staf pemerintah desa. Rapat ini dilakukan dalam rangka memberikan masukan dan evalusai untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Bandarharjo terkhusus untuk menekan *stunting* di Desa Pelat.

b) *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

kepercayaan masyarakat otomatis akan meningkat, mulai dari data anak yang terdiagnosis *stunting* hingga informasi mengenai langkah-langkah terkait kegiatan penanggulangan *stunting*.

“Kepercayaan dari dinas terkait dan yang lain bersifat medukung penuh untuk setiap program yang kami usulkan, apalagi dalam penanganan *stunting* di Desa Pelat ini. Melalui diskusi dan rapat yang sudah dilakukan selama ini berjalan baik-baik saja” (Wawancara Hajriati, Mei 2024)

Dengan dipercayanya para kolaborator untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, maka segala kegiatan yang dilaksanakan selalu dirundingkan agar tidak terjadi salah paham atau kesalahpahaman antar kolaborator, sehingga pembangunan di desa Pelat tetap berjalan. Artinya penanganan terhadap hambatan masih terus berjalan.

c) *Commitment To The Process*

Pemerintah maupun sektor swasta saling bergantung. Karena keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, pemerintah terpaksa melibatkan perusahaan swasta untuk mengatasi salah satu masalah sosial *stunting*.

“Komitmen yang kami buat dari pemerintah sendiri tercermin dalam perjanjian kerja sama kami, di mana kami bertanggung jawab untuk menyiapkan desain dan desain untuk menangani *stunting*, dengan jelas disebutkan hak dan kewajiban apa yang kami miliki dan sebaliknya akan bekerja sesuai ketentuan perjanjian dan tidak akan melanggarnya” (wawancara Hajuliati, Mei 2024)..

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, pemerintah desa berkomitmen melaksanakan rencana yang telah disepakati secara transparan dan akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin fiskal diciptakan untuk tujuan itu.

d) *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

kegiatan posyandu maka TPK memperoleh data terkait keadaan anak yang terindikasi *stunting*, sehingga dengan informasi data tersebut TPK nantinya akan dapat perhatian dari pemerintah. Jadi dengan dasar bukti dari data di posyandu akan memudahkan TPK dalam melakukan pengajuan untuk penanganan program *stunting*. Oleh karena itu TPK benar-benar mendorong dan menekankan masyarakat dalam pentingnya mengikuti posyandu.

“Partisipasi untuk mengikuti posyandu masih kurang, karena sebagian masyarakat Pelat itu rata-rata pada kerja, jadi anaknya dimongke atau dititipkan dan biasanya beda RT jadi untuk jadwal posyandunya beda. Ya jadi kurang memperhatikan. Dan biasanya untuk penanganannya jadi telat karena kadang waktu mengikuti posyandu atau ada keluhan baru datang ke Puskesmas gitu”. (Wawancara Evi Susanti, Mei 2024).

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menyimpulkan Saling pengertian hanya bisa terjalin antara pemerintah dan sektor swasta. Masih banyak masyarakat yang belum memahami permasalahan *stunting*. Sebab, masih banyak masyarakat yang kurang aktif atau tidak setiap saat mengikuti pelatihan posyandu atau *stunting*.

e) *Intermediated Outcome* (Dampak Sementara)

Dampak sementara yang dicapai dalam proses kolaboratif dapat memotivasi para pemangku kepentingan untuk bertindak dan berinovasi untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut diperoleh hasil awal dalam proses kolaboratif TPK dengan Puskesmas UPTD Kecamatan Unter Iwes dengan adanya posyandu. Ini ditandai dengan penurunan yang signifikan dalam tingkat *stunting*.

2) Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Proses Kolaborasi Program Penanganan *Stunting* Di Kecamatan Unter Iwes

Pentingnya peran TPK dalam mengatasi *stunting* tercermin dalam intervensi yang sensitif dan spesifik. Keluarga dan masyarakat umum juga dijadikan sasaran dan sasaran pelaksanaan intervensi dan intervensi gizi sensitif, spesifik lebih ke masyarakat yang anaknya terindikasi *stunting*. Sehingga dalam pelaksanaan intervensi sensitif dan intervensi spesifik menyesuaikan terhadap sosial budaya masyarakat lokal.

Berdasarkan beberapa program dalam ruang lingkup campur tangan pada tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa :

a) Intervensi Gizi Spesifik

Dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik di Desa Pelat seperti yang ada ditabel atas dilihat berdasarkan program kerja TPK Desa Pelat tahun 2023 yaitu beberapa diantaranya ada pemberian makanan tambahan (PMT), pendamping gizi, pembentukan kelompok ASI eksklusif dan pemantauan gizi dan berat badan.

“Beberapa kendala yang muncul menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) diantaranya kurangnya kerjasama orang tua yang kurang sabar dalam menyuapi anaknya/ anak tidak mau makan/ bosan dengan menu yang disediakan”. (wawancara Evi Susanti, Mei 2024)

b) Intervensi Gizi Sensitif

Penyebab langsung masalah gizi pada balita adalah penyakit infeksi yang dideritanya. Oleh karena itu, perlu digalakkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kebersihan lingkungan. Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Pelat memiliki program rutin untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Berikut adalah beberapa pernyataan dari para informan.

“Kami juga ada hari Jumat yang disebut Jumat Bersih, di mana kami mengumpulkan kaleng dan sampah dari luar rumah kami, membersihkan selokan dan melakukan

bakti sosial sebulan sekali jika tidak setiap dua bulan masyarakat. Layanan kebersihan terutama lingkungan. Peningkatan PHBS Masyarakat”. (Wawancara, Hajriati Mei 2024)

Dari informasi yang diperoleh peneliti menyimpulkan bahwa peran TPK di desa Pelat adalah untuk mendukung program *stunting*. Dalam memerangi *stunting*, TPK berperan sebagai pembawa perubahan untuk membantu masyarakat mencapai tujuan pembangunannya kesehatannya.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh TPK di Desa Pelat dengan proses kolaborasi peneliti gambarkan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Pemberian makanan pendamping ASI (PMT) mendukung ibu hamil dan janinnya dengan memastikan tumbuh kembang anak sesuai usia, sehingga mencegah *stunting* yang saat ini menjadi masalah kesehatan umum. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal itu mendapat perhatian serius. *Stunting* pada masa kanak-kanak atau *stunting* merupakan kondisi dimana tinggi badan anak tidak sesuai dengan tinggi badan anak pada usia yang sama. Penyebabnya adalah gizi buruk dan lingkungan yang tidak sehat. Perkembangan otak tampaknya terganggu, sistem melemah, dan IQ berkurang.

Pada kegiatan ini pemberian makanan tambahan (PMT) ini juga merupakan salah satu program menjadi andalan dan dilakukan oleh para stakeholder. Karena dengan program ini terbukti efektif dalam menurunkan angka *stunting*.

b. Pemberian Imunisasi dan pemberian vitamin

Selain vaksinasi pada anak dan ibu hamil, petugas kesehatan juga memberikan vitamin A dan vaksinasi. Vitamin dan vaksinasi dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan bayi Anda dan membuatnya tidak mudah terserang penyakit. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Anna sebagai informan.

“Pemberian vitamin digunakan untuk memberikan antibodi dan kekebalan pada bayi dan anak kecil, sedangkan imunisasi digunakan untuk mengimunisasi tubuh bayi dan anak kecil terhadap virus dan penyakit.” ((Wawancara dengan Ibu Ayu Eka Karthikasari, Mei 2024)

Di Posyandu, tumbuh kembang ibu hamil dan anak dapat dipantau melalui pelaksanaan vaksinasi dan pemberian vitamin, sehingga anak mendapat gizi yang baik. Memperluas pengetahuan dan pengalaman yang beragam dengan tenaga kesehatan dan peserta lain mengenai kesehatan ibu dan anak yang dapat mencegah risiko gizi buruk dan gizi buruk, serta memberikan sarana bagi para ibu..

c. Pemantauan gizi dan berat badan

Berdasarkan program dari TPK, pemantauan pertumbuhan dilakukan setiap satu bulan sekali, pemantauan pertumbuhan dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang terlibat seperti petugas gizi, bidan, petugas KIA dan kader posyandu. Pemantauan pertumbuhan dilakukan di Puskesmas dan Posyandu. Program penanggulangan gizi yang ada disini yaitu biasanya pemantauan pertumbuhan balita melalui pertimbangan di posyandu. Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dilakukan di posyandu oleh kader posyandu dengan jangka waktu sebulan sekali.

“Terkait dengan kinerja TPK dalam penanggulangan *stunting* di Desa Pelat ini PKK biasanya melakukan kegiatan yang bersifat mengedukasi masyarakat terkait dengan gizi maupun melalui kegiatan posyandu setiap bulan serta rutin melaksanakan kegiatan rutin pemeriksaan kesehatan ibu dan anak” (wawancara, Evi Susanti Mei 2024)

d. Penyuluhan tentang pencegahan *stunting*

Pelatihan merupakan proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyelenggara dan peserta pelatihan untuk mengembangkan proses perubahan perilaku yang mengungkapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka yang terkena dampak

langsung atau tidak langsung.

“TPK berada di garda terdepan dalam mendukung pemerintah dalam menurunkan angka keluarga yang beresiko stunting dan menurunkan angka stunting. Termasuk mengurangi kasus gizi buruk dan stunting. Melalui Tim Family Support, kami memberikan edukasi komprehensif kepada masyarakat khususnya orang tua, ibu hamil, dan ibu yang memiliki anak kecil, tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak.” (wawancara Evi Susanti, Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan Evi Susanti, TPK Dengan memberikan informasi perkembangan kehidupan sehari-hari, sebagai pendidik lokal dan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pemerintah, dengan memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk aktif melaksanakan program Kabupaten Sumbawa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam program Penanganan *Stunting* dan kegiatan sosialisasi terkait penanggulangan *stunting*, yaitu :

- a) Dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan, pelaksanaan *collaborative governance* program stunting dilaksanakan secara intensif khususnya di Desa Pelat, dan tercapainya konvergensi program stunting di kalangan pemangku kepentingan yang terorganisir. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat meningkat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, dukungan finansial yang signifikan terhadap stunting diberikan melalui berbagai jalur distribusi sesuai peran dan mandat masing-masing, sehingga pelaksanaan program stunting dilakukan secara terpadu dan kohesif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. sikap kooperatif.
- b) Peran TPK dalam proses kolaboratif program penanganan stunting di desa Pelat adalah TPK mempunyai dua peran. Salah satunya adalah sebagai fasilitator dan instruktur dalam program penanganan stunting yang melibatkan pemerintah, CSR, dan swasta PT AMNT. Itu dibangun secara kolaboratif. Dimana intervensi dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan kolaboratif dengan sasaran kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa Pelat untuk mencegah stunting. Selain itu, TPK berperan sebagai pendamping.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anita, R., & Ariyanti, M. (2013). *Keberhasilan Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan untuk Balita di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Kesehatan, IV(1) :297–304.
- Ansell, & Gash. (2007). *Collaborative governance in Theory Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Journal of Public Administration Research and Theory., 559.
- Anwar, S. (1991). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022, 11). *Percepatan Penurunan Stunting*. Retrieved from JDIH BPK RI: <http://peraturan.bpk.go.id>.
- BPK. (2021). Perpres No 72 TAHUN 2021. Retrieved from Percepatan Penurunan Stunting: <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Cahya, N. (2020). *Proses Collaborative Governance Dalam Penerapan*. Skripsi.
- Cahyati, W. H., Prameswari, G. N., C. W., & Karnowo. (2019). *Kajian stunting di Kota Semarang*. Jurnal Riptek, 101-106.
- Chandra, B. R., Darwis, R. S., & S. H. (2021). *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pencegahan Stunting*. Jurnal Pekerjaan Sosial, 107-123.
- Choirul Saleh, M. (2018). *Konsep Pengerian dan Tujuan Kolaborasi*. Jakarta: <https://pustaka.ut.ac.id>.
- Citrakesumasari, Kurniati, Y., Syam, A., Salam, A., & Virani, D. (2020). *Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Kader PKK Kecamatan Barebbo di Kabupaten Bone*. Journal unhas.

- Davies, A., & Rehema M, W. (2012). *Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder expectations in deer management in Scotland*. Journal of Environmental Management, 160–169.
- Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2022). *Stunting Dicegah, Masa Depan Kian Cerah*. Retrieved from <https://dinkes.semarangkota.go.id/>.
- Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. (2020, Juli 17). *TP PKK Berperan Penting Dalam Penanganan Stunting*. Retrieved from Dinas Kesehatan Gorontalo : <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/tp-pkk-berperan-penting-dalam-penanganan-stunting/>
- Fendt, T. C. (2010). *Introducing Electronic Supply Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industries*. Berlin : Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin.
- Fitriani, A. O. (2021). *Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mensosialisasikan Program Kesehatan di Desa Sepukur Kecamatan Lantung*. Journal Of Communication Science.
- Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Haskas, Y. (2020). *Gambaran Stunting di Indonesia : Literatur Review*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis.
- Heroeputri, A., & Santoso, M. A. (2013). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WLHI).
- Hia, E. E. (2019). *The Role Of The Supervisor Board In Improving*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 35-51.
- Horoeputri, Arimbi, & A. S. (2013). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta.
- Hura, Meiyah Rahmat. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawa Kabupaten Nias*. Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Sumatra Utara.
- Ima Wati, d. (n.d.). (2015). *Peranan PKK dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Enda Rejo Kecamatan Seputih Agung*.
- Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). *Collaborative governance dalam penanganan stunting*. Journal.feb.unmul.ac.id.
- Junaidi.(2016). *Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik Di Kota Tanjungpinang*. Jurnal FISIP UMRAH. Kesra.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Situasi Balita Pendek*. Retrieved from <https://doi.org/10.1145/379277.312726>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Kemendes Tambah 3 Jenis Vaksin Imunisasi Rutin, Salah Satunya HPV*. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Maulana, H. D. (2009). *Promosi Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Miftahuljannah, Isabella, & Amaliatukwalidain. (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Bidang*. Jurnal Wedana, 6- 14.
- Mirnowari. (2018). *Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mitchell, S., & Stephen M, S. (2000). *The governance and management of effective community health partnerships: A typology for research, policy, and practice*. Milbank Quarterly, 241–289.
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mugiati, Mulyadi, Anam, & Najah. (2018). *Faktor penyebab anak Stunting usia 25-60 Bulan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar*. Jurnal Ners dan Kebidanan, 268-278.
- Nurhayati. (2018). *Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender*. Jurnal Trias Politika, 153-162.

- Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/ Kota*. Edisi November 2018.
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak PKK Pusat. (2010). *Hasil Rapat Kerja Tahunan Nasional VII OKK Tahun 2010*. Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat.
- Pemerintah Kota Semarang. (2022, Juli 17). *Hendi Tia Kolaborasi Luncurkan SI BENING Untuk Tekan Angka Stunting*. Retrieved from semarang kota: <https://semarangkota.go.id>.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 Tentang *Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Kabupaten Sumbawa*.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2020 Tentang *Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Kabupaten Sumbawa*.
- PKK Prov. DKI Jakarta . (2019). *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Prov. DKI Jakarta*. Retrieved from pkk.jakarta.go.id: <https://pkk.jakarta.go.id/sejarah-pkk/>.
- Rahmadhita, K. (2020). *Permasalahan Stunting dan Pencegahannya*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 225-229.
- Santo, B. S. (2021, November 8). *Kick Off Penanganan Stunting Kota Semarang, Tanjung Mas Menjadi Percontohan*. Retrieved from Suarakarya: <https://www.suarakarya.id/>.
- Sarwono, S. W. (2004). *Psikologi Remaja*. Jakarta: CV Rajawali.
- Shalfiah, R. (2013). *Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang*. ejournal Ilmu Pemerintahan, 975- 984.
- Solekhati, Lusan. 2014. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Tepus Kabupaten Gunungkidul Kota Yogyakarta*. Program Studi Ilmu Pemerintahan (Politik dan Pemerintahan) Universitas Gajah mada.
- Sudarmo. (2017). *Collaboration agaovernance dalam penanganan ROB di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*. Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 2.
- Suekamto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanti, & N. F. (2021). *Collaborative governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman*. Jurnal Caraka Prabu.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryahadi, A . dan Sumarto. 2001. *Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia*. Smeru Newsletter, No.03, Mei -Juni. 200.
- Sutarto, & D. M. (2010). *Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya*. Fossil Brhavior Compendium, 243-243.
- TP PKK Kota Semarang. (2022). *Sejarah PKK Kota Semarang*. Retrieved from <https://pkk.semarangkota.go.id/>.
- Trisnaningtyas, F. (2022, Maret 04). *Begini Cara Hendi Tangani Kasus Stunting di Kota Semarang*. Retrieved from GenPI.co JATENG: <https://jateng.genpi.co/simpang-lima/3070/begini-cara-hendi-tangani-kasus-stunting-di-kota-semarang?page=2>.
- Wati, I., Suntoro, I., & Yanzi, H. (2015). *Peranan PKK Dalam MeningkatkanPemberdayaan Wanita*. Jurnal FKIP.
- Wulandari, R. (2022). *Pelayanan Kesehatan Prakonsepsi Untuk Mencegah Resiko Stunting : A Scooping Review*. Universitas Indonesia Maju, 26-37.
- Yunitasari, V. (2019). *Peran Pemberdayan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.